

URGENSI EVALUASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI GORONTALO

Suripto

Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran No. 10 Jakarta

The Urgency Evaluation of Early Age Education In Order To Improve Human Development Index In Provincial Gorontalo

Early Childhood Education is an important step in creating a high quality human. Data on 2008 show that, 41% children had early childhood education. This paper presents the evaluation of early childhood education based on district and municipality in Gorontalo Province. The analysis tools are DEA-BCC-O model Solver. The results show that four districts and municipality include in efficient category which are Gorontalo Municipality, Gorontalo District, Gorontalo North District and Pohuwato District. Meanwhile, two districts are include in not efficient category which are Bone Bolango District and Boalemo District.

Keywords : PAUD, Early Age Education, Human Development Index, Level Of Education, DEA-BCC-O model Solver

A. PENDAHULUAN

Salah satu Amanat UUD'45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, Negara melalui pemerintah memiliki kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Sehingga akan menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas. Namun Hasil Survey 2002 yang dilakukan oleh PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) menempatkan Indonesia pada peringkat paling bawah di kawasan ASEN setelah Vietnam dalam bidang kualitas pendidikan. Hal ini tentu akan memberikan dampak negatif terhadap kemampuan daya saing sumber daya manusia Indonesia dengan negara ASEAN lainnya.

Saat ini, Indonesia telah kembali memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia. Komitmen ini dapat dilihat dari besarnya anggaran pendidikan pada setiap tingkatan pemerintahan sebesar 20 persen. Besarnya anggaran tersebut sebagai bentuk upaya negara dalam mempersiapkan pendidikan berkualitas dalam menciptakan manusia yang berkualitas. Dengan demikian, Indonesia akan mampu bersaing dengan dengan lain baik secara regional maupun internasional.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan langkah awal yang penting menciptakan manusia yang berkualitas. Dimana, PAUD merupakan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, sosio emosional, bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Dengan demikian, pendidikan dini dapat disebut sebagai masa membentuk karakter berkualitas atau masa usia emas (*the golden age*). Melihat pentingnya PAUD, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menetapkan kebijakan pengembangan PAUD melalui pendekatan "Holistik Integratif" (Kemdiknas, 2010). Pendekatan tersebut meliputi aspek pendidikan, aspek pelayanan gizi, pelayanan kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan anak.

Pada tahun 2008 Provinsi Gorontalo memiliki 41 persen anak usia dini (AUD) yang belum dapat menikmati pendidikan anak usia dini (PAUD). Hal tersebut didasarkan atas Data Direktorat Jenderal Pendidikan anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa Propinsi Gorontalo memiliki jumlah UAD

sebanyak 174.836 anak, sedangkan yang telah menikmati PAUD sebanyak 103.841 anak (Kemdiknas, 2010). Masih rendahnya layanan PAUD antara lain disebabkan masih terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan layanan pendidikan dini. Program pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi perhatian tersendiri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Provinsi Gorontalo (Gorontalo Post, 2010). Dalam sambutannya, Wenni (istri gubernur Gorontalo) mengatakan setiap desa yang ada, harusnya memiliki minimal satu lembaga PAUD agar anak-anak bisa mendapat pendidikan usia dini (Gorontalo Post, 2010)

Berdasarkan hal tersebut di atas maka PAUD memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas. Namun demikian, penyediaan PAUD di Provinsi Gorontalo masih belum optimal. Bagaimana efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan PAUD di Provinsi Gorontalo ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan PAUD di Provinsi Gorontalo. Evaluasi tersebut dilakukan kepada pemerintah kabupaten dan kota sebagai tingkatan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan PAUD. Tujuan evaluasi PAUD kabupaten dan kota adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi penyelenggaraan PAUD di Provinsi Gorontalo.

B. LITERATUR REVIEW DAN METODOLOGI

Pentingnya PAUD

AUD menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah berumur antara 0-6 tahun. Sedangkan berdasarkan keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, AUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang

merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal (Sadida, 2010)

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Jenis PAUD di Indonesia (Kemdiknas, 2010) meliputi Taman Kanak-Kanak (*Kindergarten*), Kelompok Bermain (*Play Group*), Taman Penitipan Anak (*Day Care*), PAUD sejenis (*Similar with Play Group*). Selanjutnya, Sistem Penyelenggaraan PAUD (Kemdiknas, 2010) dilaksanakan secara "Holistik dan Integratif"

Kewenangan Kabupaten Dan Kota Dalam Bidang PAUD

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah membagi 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan

sebagainya. Dalam bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan kota dalam khususnya PAUD antara lain meliputi :

1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. Yakni Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
3. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.
4. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
5. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
6. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
7. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
8. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
9. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya
10. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
11. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
12. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.
13. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.
14. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

Dengan kewenangan tersebut diatas, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang sangat luas dalam bidang PAUD. Kewenangan tersebut dimulai dari pembuatan kebijakan sampai evaluasi penyelenggaraan PAUD. Sehingga, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota memiliki keleluasaan dalam berkreativitas menciptakan PAUD yang berkualitas secara efisien.

Standar Penyelenggaraan PAUD

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD Pasal 1 menyebutkan bahwa Standar PAUD meliputi pendidikan formal dan nonformal yang terdiri atas :

- a. Standar tingkat pencapaian perkembangan;
- b. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Standar isi, proses, dan penilaian; dan
- d. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Pertumbuhan anak yang mencakup pemantauan kondisi kesehatan dan gizi mengacu pada panduan kartu menuju sehat (KMS) dan deteksi dini tumbuh kembang anak. Pencapaian tingkat perkembangan yang optimal dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang meliputi antara lain pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui pembiasaan.

Pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik. Pendidik PAUD bertugas di berbagai jenis layanan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal seperti TK/RA, KB, TPA dan bentuk lain yang sederajat. Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru pendamping; sedangkan pendidik PAUD

pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas guru, guru pendamping, dan pengasuh.

Standar isi, proses, dan penilaian meliputi struktur program, alokasi waktu, dan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan tingkat perkembangan, bakat/minat dan kebutuhan anak. Standar ini yang mempertimbangkan potensi dan kondisi setempat, sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan kegiatan dan pelaksanaan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan di lapangan. Perbedaan dapat terjadi karena adanya: (1) keragaman bentuk layanan PAUD (TK/RA, TPA, KB dan bentuk lain yang sederajat), yang menerapkan program paruh waktu dan program penuh waktu; (2) perbedaan kelompok usia yang dilayani (antara anak usia 0 - <2 tahun dengan anak usia 2 - <4 tahun serta 4 - ≤6 tahun); dan (3) perbedaan kondisi lembaga.

PAUD Jalur Pendidikan Formal, jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar sebanyak 20 peserta didik dengan 1 orang guru TK/RA atau guru pendamping. Kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun. PAUD Jalur Pendidikan Nonformal, jumlah peserta didik setiap rombongan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan usia dan jenis layanan program, dan tersedia minimal seorang guru/guru pendamping. Selain itu harus tersedia pengasuh dengan perbandingan antara pendidik (guru/guru pendamping/pengasuh) dan peserta didik sbb:

- Kelompok usia 0 - <1 tahun 1 : 4 anak;
- Kelompok usia 1 - <2 tahun 1 : 6 anak;
- Kelompok usia 2 - <3 tahun 1 : 8 anak;
- Kelompok usia 3 - <4 tahun 1 : 10 anak;
- Kelompok usia 4 - <5 tahun 1 : 12 anak;
- Kelompok usia 5 - ≤6 tahun 1 : 15 anak.

Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan PAUD. Standar sarana dan prasarana meliputi jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam menyelenggarakan proses penyelenggaraan PAUD. Standar pengelolaan merupakan kegiatan manajemen satuan lembaga PAUD yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan PAUD. Standar pembiayaan meliputi jenis dan sumber pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD.

Konsep Evaluasi PAUD

Evaluasi (Evaluation) merupakan proses penilaian pada sesuatu. Evaluasi dapat dilakukan pada tiga tahap yakni tahap awal (pretest), tahap proses dan akhir (posttest). Evaluasi tahap pretest dilakukan untuk menguji konsep dan rencana pelaksanaan. Evaluasi proses dilakukan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan supaya sesuai dengan rencana. Evaluasi posttest dilakukan untuk melihat tercapainya tujuan dan dijadikan analisa masukan kegiatan berikutnya.

Tujuan evaluasi yakni untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi dari suatu tahapan kegiatan. Efektivitas umumnya lebih menitikberatkan pada hasil kegiatan yang telah direncanakan. Sedang efisiensi dapat dilihat lebih luas yakni dengan melakukan perbandingan antara input dan output.

Kajian evaluasi ini bersifat post test. Evaluasi menggunakan data-data yang telah dihasilkan pada tahun 2008. Objek kajian evaluasi penyelenggaraan PAUD khususnya Taman Kanak-Kanak (TK) yang dilaksanakan Kabupaten dan Kota pada Provinsi Gorontalo.

Metode dan Alat Analisis

Kajian ini menggunakan metode evaluasi eksploratif. Sedangkan teknik yang digunakan *Library Research*. Dimana, kajian ini menggunakan dokumen utama Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2009 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo sebagai bahan evaluasi. Hasil kajian ini menentukan efisiensi Kabupaten dan Kota pada Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan PAUD.

Evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat efisiensi sesuatu proses. Untuk mengukur efisiensi dibutuhkan adanya nilai khusus. Seperangkat nilai khusus untuk mengukur efisiensi teknis adalah bahwa jumlah minimum *input* harus dikeluarkan untuk menghasilkan *output* dalam jumlah tertentu. Jika input yang digunakan melebihi dari yang diperlukan dalam menghasilkan *output*, maka menunjukkan pemborosan sumber daya, sehingga dengan demikian dikatakan tidak efisien.

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan salah satu instrumen yang dapat mengukur tingkat efisiensi organisasi dengan membandingkan (rasio) antara *input* dengan *output* (Cooper et al, 2006). Namun DEA hanya dapat digunakan untuk mengevaluasi jika terdapat beberapa objek atau *decision making unit* (DMU). Hasil analisis DEA akan menentukan DMU yang efisien dan tidak efisien. DEA memiliki beberapa variasi model sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi organisasi dengan indikator kinerja yang sederhana hingga yang sangat rumit. Model DEA ini antara lain terdiri dari BCC, CCR, additive, SBM, Hybrid, dan Russel (Cooper et al, 2006). Alat analisis yang digunakan dalam kajian ini yakni DEA-BCC-Output. Sehingga rekomendasi perbaikan dalam kajian ini akan difokuskan pada *output* penyelenggaraan PAUD khususnya TK di kabupaten dan kota pada provinsi Gorontalo.

:: *Suripto*

C. DESKRIPSI PAUD PROVINSI GORONTALO

Provinsi Gorontalo termasuk sebagai provinsi muda yang dihasilkan dari pemekaran Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis Provinsi Gorontalo terletak antara 0° 19' - 1° 15' Lintang Utara dan 121° 23' - 123° 43' Bujur Timur. Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur, sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Luas Wilayah Luas Provinsi Gorontalo adalah 12.215,44 km² atau 0,64 persen dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia.

Wilayah Administratif Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota yang meliputi Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Masing-masing wilayah administrasi tersebut terbagi lagi menjadi beberapa wilayah administrasi di bawahnya, yaitu kecamatan dan desa/kelurahan. Pada tahun 2008, Provinsi Gorontalo terdiri dari 66 Kecamatan dan

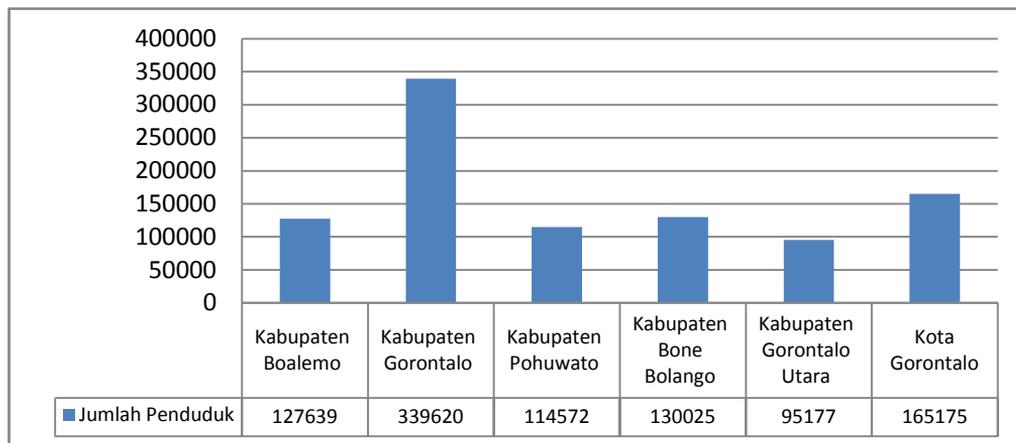
615 Desa/ Kelurahan. Secara rinci jumlah kecamatan, kelurahan dan desa seperti pada tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Wilayah Administasi Kecamatan, Kelurahan dan Desa

	Kecamatan	Kelurahan & Desa
Kabupaten Boalemo	7	84
Kabupaten Gorontalo	17	168
Kabupaten Pohuwato	13	105
Kabupaten Bone Bolango	17	153
Kabupaten Gorontalo Utara	5	56
Kota Gorontalo	6	49

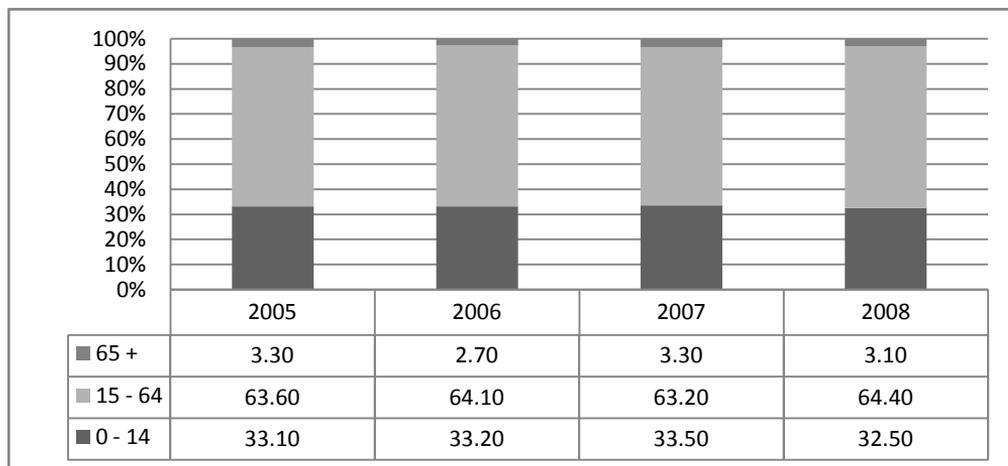
Sumber : Gorontalo Dalam Angka 2009

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2008 sebanyak 972.208 jiwa. Dengan pembagian sebanyak 486.708 jiwa penduduk laki-laki dan 485.500 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, penduduk Provinsi



Sumber: Gorontalo Dalam Angka 2009

Grafik 1
Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota Tahun 2008



Sumber : Gorontalo Dalam Angka 2009

Grafik 2

Prosentase Penduduk Menurut Kelompok Umur tahun 2005 s.d 2008

Gorontalo bertambah 1,24 persen. Selanjutnya, kepadatan penduduk terbanyak berada di Kota Gorontalo dengan 2.549 jiwa/km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya 25 jiwa/km². Penyebaran penduduk Provinsi Gorontalo berdasarkan Kabupaten dan Kota seperti pada Grafik 1.

Prosentase penduduk Provinsi Gorontalo menurut kelompok umur seperti pada grafik 2.

Berdasarkan Grafik 2 tersebut terlihat bahwa rata-rata prosentase umum 0 sampai dengan 14 adalah sebesar 33 persen. Selanjutnya berdasarkan data Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal menunjukkan bahwa jumlah UAD Provinsi Gorontalo tahun 2008 sebanyak 174,836 anak. Sedangkan yang telah menikmati PAUD sebanyak 103,836 anak atau 59 persen, hal tersebut berarti sebanyak 41 persen belum menikmati PAUD. Penyediaan sarana sekolah TK pada setiap Kabupaten dan Kota seperti pada tabel 2.

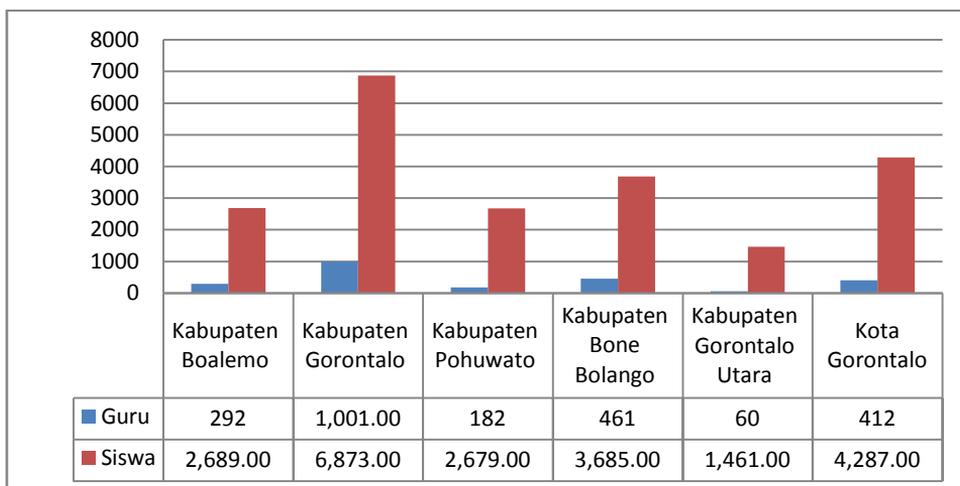
Tabel 2

Perbandingan Jumlah Kelurahan dan Desa dengan Jumlah Sekolah

	Kelurahan dan Desa	Jumlah Sekolah	Selisih
Kabupaten Boalemo	84	68	-16
Kabupaten Gorontalo	168	167	-1
Kabupaten Pohuwato	105	64	-41
Kabupaten Bone Bolango	153	104	-49
Kabupaten Gorontalo Utara	56	37	-19
Kota Gorontalo	49	80	+31

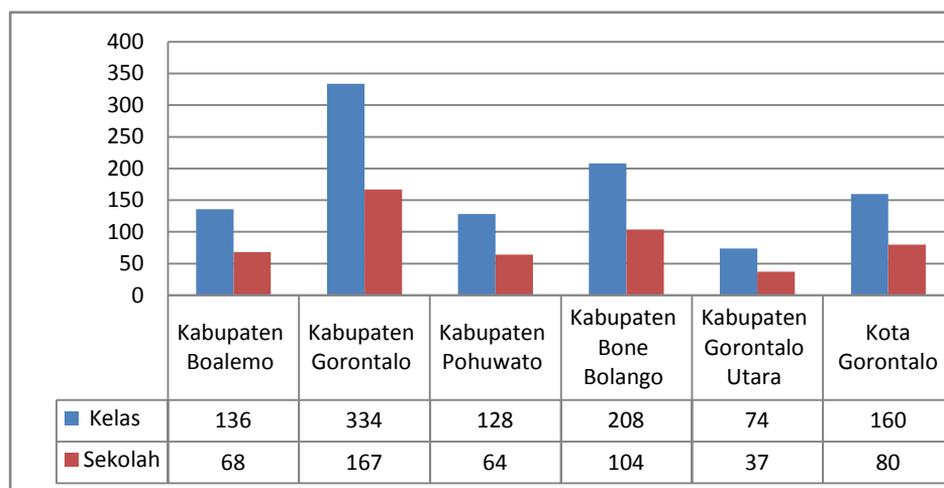
Sumber : Gorontalo Dalam Angka 2009

:: *Sripto*



Sumber : Gorontalo Dalam Angka 2009

Grafik 3
Jumlah Siswa dan Guru TK Provinsi Gorontalo Tahun 2008



Sumber : Gorontalo Dalam Angka 2009

Grafik 4
Jumlah Sekolah dan Kelas TK Provinsi Gorontalo Tahun 2008

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten di Provinsi Gorontalo belum semua Desa memiliki Sekolah TK. Selanjutnya, Jumlah AUD yang menikmati pendidikan di PAUD jenis TK sebanyak 21,674 anak. Sekolah TK negeri dan swasta di provinsi Gorontalo sebanyak 520 sekolah dengan jumlah kelas sebanyak 1,040 kelas dan jumlah guru sebanyak

2,408 orang. Rincian jumlah sekolah, siswa, guru dan kelas TK pada setiap kabupaten dan kota seperti pada grafik 3 dan grafik 4.

Kabupaten Pohuwato memiliki jumlah siswa sebanyak 2,679 siswa, kelas belajar sebanyak 128 unit, dan jumlah guru sebanyak 182 orang. Berdasarkan data tersebut perbandingan guru siswa sebesar

1 : 15 dan perbandingan kelas siswa sebesar 1 : 21. Apabila dibandingkan dengan standar penyelenggaraan PAUD, maka Kabupaten Pohuwato memiliki perbandingan guru siswa yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD. Tetapi, jika dalam satu kelas diasuh oleh satu guru maka Kabupaten Pohuwato melebihi standar yang telah ditetapkan yakni 20 siswa.

Kabupaten Bone Bolango memiliki jumlah siswa sebanyak 3,685 siswa, kelas belajar sebanyak 208 unit, dan jumlah guru sebanyak 461 orang. Berdasarkan data tersebut perbandingan guru siswa sebesar 1 : 8 dan perbandingan kelas siswa sebesar 1 : 18. Apabila dibandingkan dengan standar penyelenggaraan PAUD, maka Kabupaten Bualemo memiliki perbandingan guru siswa yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD.

Kabupaten Gorontalo Utara memiliki jumlah siswa sebanyak 1,461 siswa, kelas belajar sebanyak 74 unit, dan jumlah guru sebanyak 60 orang. Berdasarkan data tersebut perbandingan guru siswa sebesar 1 : 24 dan perbandingan kelas siswa sebesar 1 : 20. Apabila dibandingkan dengan standar penyelenggaraan PAUD, maka Kabupaten Bualemo memiliki perbandingan guru siswa yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD.

Kota Gorontalo memiliki jumlah siswa sebanyak 4,287 siswa, kelas belajar sebanyak 160 unit, dan jumlah guru sebanyak 412 orang. Berdasarkan data tersebut perbandingan guru siswa sebesar 1 : 10 dan perbandingan kelas siswa sebesar 1 : 27. Apabila dibandingkan dengan standar penyelenggaraan PAUD, maka

Kabupaten Pohuwato memiliki perbandingan guru siswa yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD. Tetapi, jika dalam satu kelas diasuh oleh satu guru maka Kabupaten Pohuwato melebihi standar yang telah ditetapkan yakni 20 siswa.

D. ANALISIS EVALUASI DENGAN DEA

Data Input dan Output

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, alat analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah DEA-BCC-Output Solver. Untuk dapat menggunakan alat tersebut dibutuhkan indikator input dan output untuk mengukur tingkat efisiensi TK. Indikator tersebut sebagai berikut :

- Indikator Input meliputi Jumlah Kelas dan Jumlah Guru pada setiap Kabupaten dan Kota
- Indikator Output adalah Jumlah Siswa pada setiap Kabupaten dan Kota.

dengan kebijakan dari masing-masing sekolah di setiap Kabupaten dan Kota pada Provinsi Gorontalo.

Data Input dan Output yang digunakan sebagai bahan analisis dengan DEA-BCC-O Solver seperti pada tabel 3.

Statistik Input dan Output

Data yang digunakan dalam Analisis DEA- BCC-O Solver LV3.0 meliputi jumlah DMUs sebanyak 6 unit, Input sebanyak 2 dan output sebanyak 1 seperti pada tabel 3. Hasil perhitungan statistik data input dan output dengan menggunakan DEA model -Solver LV3.0/ BCC(BCC-O) seperti terlihat pada tabel 4.

Tabel 3
Data Input dan Output Pendidikan TK Berdasarkan Kabupaten dan Kota

Kabupaten/ Kota	Input		Output
	Jumlah Kelas	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
Kabupaten Boalemo	136	292	2,689
Kabupaten Gorontalo	334	1,001	6,873
Kabupaten Pohuwato	128	182	2,679
Kabupaten Bone Bolango	208	461	3,685
Kabupaten Gorontalo Utara	74	60	1,461
Kota Gorontalo	160	412	4,287

Sumber : Gorontalo Dalam Angka 2009

Tabel 4
Statistik Data Input dan Output

	Kelas TK	Guru TK	Siswa TK
Maksimal	334	1001	6873
Minimal	74	60	1461
Rata-Rata	173.3	401.3	3612.3
Standar Deviasi	82.2	300	1705.1

Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/BCC(BCC-O)

Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang paling banyak memiliki kelas TK yaitu sejumlah 334 unit, guru 1001 orang, dan siswa 6873 orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Gorontalo Utara dengan jumlah kelas 74 unit, guru 60 orang dan siswa 1461 orang. Nilai rata-rata untuk jumlah kelas TK sebesar 173,3 dengan standar deviasi 82,2 jumlah guru TK sebesar 401,3 dengan standar deviasi 300 dan jumlah siswa sebesar 3612,3 dengan standar deviasi 1705,1.

Korelasi Input dan Output

Hasil analisis DEA- BCC-O Solver LV3.0 menunjukkan bahwa korelasi input dan output seperti pada tabel 5

Tabel 5 menunjukkan bahwa korelasi antara indikator yang digunakan untuk melakukan evaluasi efisiensi pendidikan TK di Provinsi Gorontalo sangat kuat. Sehingga hasil evaluasi dari analisis DEA lebih akurat dan dapat menggambarkan kondisi sebenarnya.

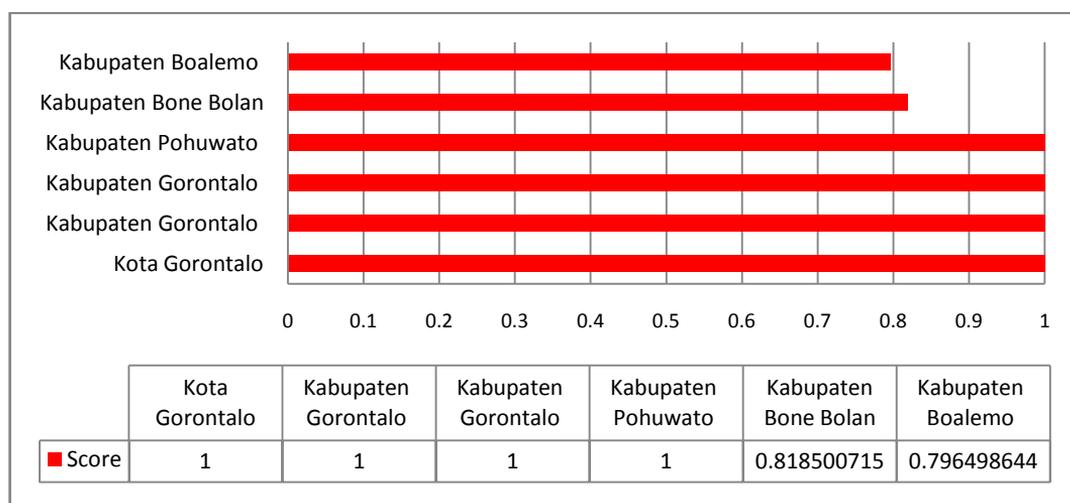
Peringkat dan Nilai DMUs

Hasil analisis DEA- BCC-O Solver LV3.0 menunjukkan bahwa peringkat dan nilai masing-masing DMUs seperti pada Grafik 5.

Tabel 5
Koreksi Data Input dan Output

	Kelas TK	Guru TK	Siswa TK
Kelas TK	1	0.988657	0.961049
Guru TK	0.988657	1	0.979824
Siswa TK	0.961049	0.979824	1

Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/BCC(BCC-O)



Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/BCC(BCC-O)

Grafik 5
Peringkat dan Nilai MDUs

Grafik 5 menunjukkan bahwa sebanyak empat kabupaten dan kota memiliki peringkat satu dengan nilai satu. Nilai satu berarti kabupaten dan kota tersebut telah efisien. Selanjutnya terdapat dua kabupaten menempati peringkat lima dan enam dengan nilai untuk kabupaten Bone Bolango sebesar 0,82 sedangkan Kabupaten Bualemo memiliki nilai sebesar 0,80. Nilai kedua kabupaten tersebut menunjukkan bahwa tidak efisien. Kabupaten Bone Bolango memiliki ketidakefisienan sebesar 1,22 dan kabupaten Boalemo sebesar 1,26.

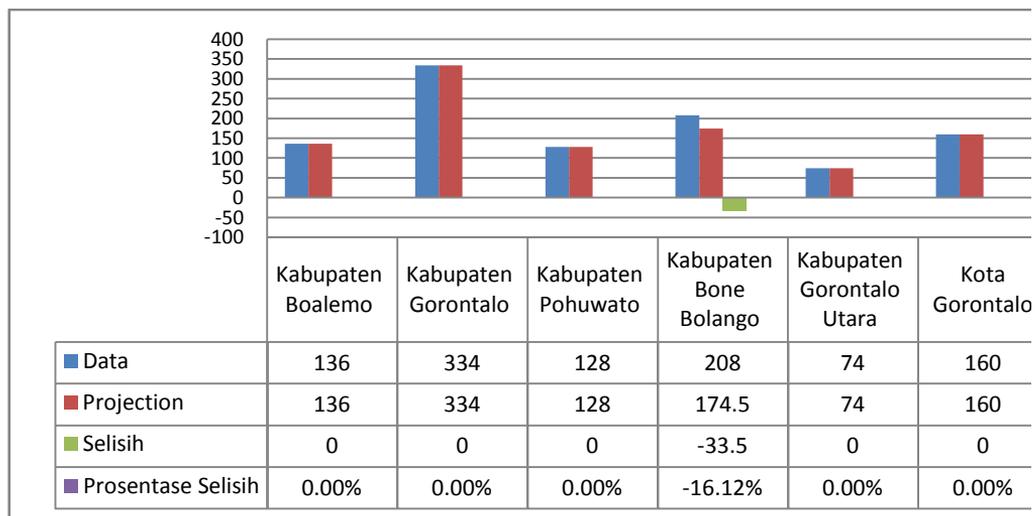
Analisis Proyeksi Peningkatan Efisiensi DMUs

Indikator Jumlah Kelas

Analisa proyeksi dalam meningkatkan efisiensi penyelenggara-an pendidikan TK di Provinsi Gorontalo meliputi proyeksi jumlah kelas, proyeksi jumlah guru dan proyeksi jumlah siswa. Hasil analisis proyeksi DEA- BCC-O Solver LV3.0, jumlah kelas yang efisien seperti pada grafik 6.

Grafik 6 menunjukkan bahwa lima kabupaten kota telah efisien dan hanya Kabupaten Bone Bolango yang perlu melakukan efisiensi pada jumlah kelas. Jumlah kelas yang dimiliki saat ini sebanyak 208 sedangkan hasil nilai proyeksi efisiensi sebesar 175 kelas sehingga kabupaten bone bolango harus mengurangi sebanyak 33 kelas. Akan

:: *Sripto*



Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)

Grafik 6

Proyeksi Peningkatan Efisiensi untuk Indikator Jumlah Kelas TK

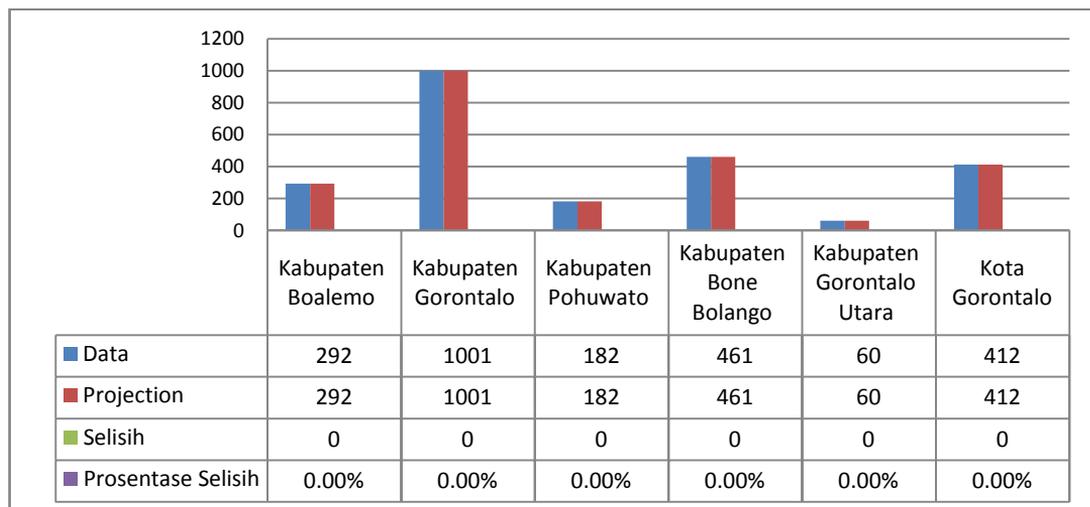
tetapi pengurangan jumlah kelas untuk meningkatkan efisiensi tentunya bukanlah jalan keluar baik. Hal ini ternyata terkait dengan masih banyaknya AUD di Kabupaten Bone Bolango yang belum menikmati PAUD. Sehingga untuk meningkatkan efisiensi kelas yang sudah ada maka perlu diupayakan untuk

meningkatkan jumlah siswa TK.

Indikator Jumlah Guru

Hasil analisis proyeksi DEA- BCC-O Solver LV3.0, Jumlah guru yang efisien seperti yang ditunjukkan pada grafik 7.

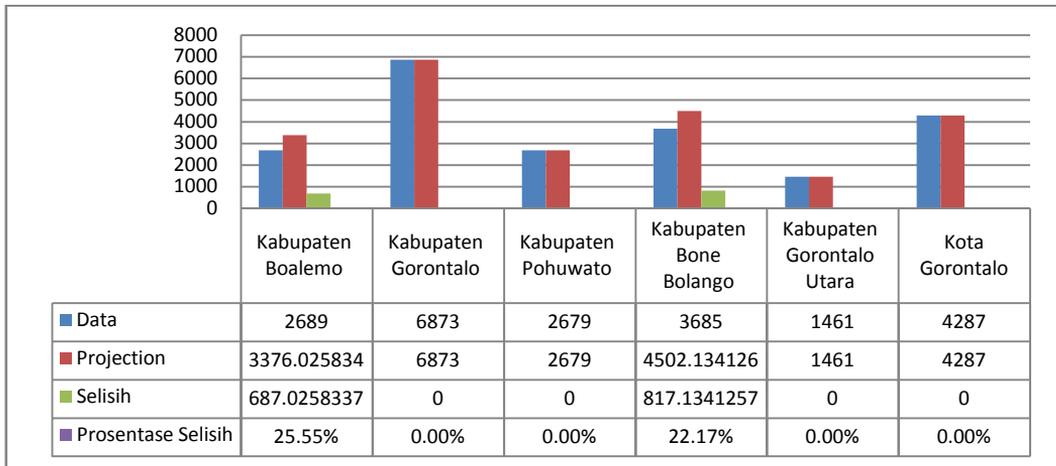
Grafik 7 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo



Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)

Grafik 7

Proyeksi Peningkatan Efisien untuk Indikator Jumlah Guru TK



Grafik 8
Proyeksi Peningkatan Efisien untuk Indikator Jumlah Siswa TK

telah efisien untuk penggunaan jumlah guru. Oleh karena itu, apabila mendasarkan dengan jumlah saat ini maka tidak perlu ada pengurangan. Namun demikian, jumlah AUD yang belum menikamati PAUD khususnya pendidikan TK di provinsi gorontalo masih sebesar 41 persen, maka setiap kabupaten masih perlu meningkatkan jumlah guru untuk meningkatkan pelayanan pendidikan TK.

Indikator Jumlah Siswa

Hasil analisis proyeksi DEA- BCC-O Solver LV3.0, jumlah siswa yang efisien seperti pada grafik 8 dibawah ini

Grafik 8 menunjukkan sebanyak empat kabupaten dan kota telah efisien dan sebanyak dua kabupaten tidak efisien. Kabupaten yang tidak efisien adalah Boalemo dan Bone Bolango. Kabupaten Boalemo untuk mencapai tingkat efisiensi harus meningkatkan jumlah siswa minimal 25 persen atau 687 siswa sedangkan Bone Bolango harus meningkatkan jumlah siswa minimal 22 persen atau 817 siswa.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis DEA-BCC-O diatas maka dapat disimpulkan bahwa empat kabupaten dan kota telah relatif efisien dan dua kabupaten relative tidak efisien. Kabupaten dan Kota yang telah relative efisien meliputi Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Sedangkan yang tidak efisien meliputi Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango. Kabupaten Boalemo dalam meningkatkan efisiensinya harus melakukan peningkatan jumlah siswa sebanyak 25,6 persen. Sedangkan Kabupaten Bone Bolango dapat meningkatkan efisiensinya dengan meningkatkan jumlah siswa sebesar 22,2 persen.

Selanjutnya, Kabupaten yang relative tidak efisien dapat meningkatkan efisiensinya dengan merujuk pada kabupaten yang telah relatif efisien dan memiliki kedekatan nilai sebagai berikut :

- Kabupaten Boalemo : Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo
- Kabupaten Bone Bolango : Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontal

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo,
(2009) Gorontalo Dalam Angka 2009,
Badan Pusat Statistik Provinsi
Gorontalo
- Cooper, William W., Seiford, Lawrence M.,
and Tone, Kaoru, (2006) *Data
Envelopment Analysis : A
Comprehensive Text With Models,
Applications, References and Dea-
Solver Software*, Springer, New York,
USA
- Mengenal Pendidikan Anak Usia Dini di
Indonesia
([http://www.paud.depdiknas.go.
id/index.php/menu-
utama/berita/671-mengenal-
pendidikan-anak-usia-dini-di-
indonesia](http://www.paud.depdiknas.go.id/index.php/menu-utama/berita/671-mengenal-pendidikan-anak-usia-dini-di-indonesia)) diakses 21 juli 2010
- PAUD Melalui Pendekatan "Holistik
Integratif"
([http://www.kemdiknas.go.id/oran
g-tua/pendidikan-anak-usia-
dini.aspx](http://www.kemdiknas.go.id/oran-g-tua/pendidikan-anak-usia-dini.aspx)) diakses 19 Juli 2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2009 Tentang Standar Pendidikan
Anak Usia Dini
- Sadida, Dalila. (2010). Pentingnya
Pendidikan Anak Usia Dini di
Indonesia
([http://sapidadalila.wordpress.com
/2010/01/03/pentingnya-
pendidikan-anak usia-dini-di-
indonesia/](http://sapidadalila.wordpress.com/2010/01/03/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini-di-indonesia/)) diakses 22 Juli 2010
- Tendik Dan Pengelola Paud Ikuti Orientasi
([http://www.gorontaloprov.go.id/b
erita-gorontalo/pendidikan/146-
tendik-dan pengelola-paud-ikuti-
orientasi.html](http://www.gorontaloprov.go.id/berita-gorontalo/pendidikan/146-tendik-dan-pengelola-paud-ikuti-orientasi.html)) diakses 22 Juli 2010